

ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA SEMARANG PROVINSI JAWA TENGAH

Evy Kurniawati

NPP. 29. 0793

*Asdaf Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah
Program Studi Keuangan Publik*

Email: evykurnia100@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): The author focuses on the financial performance results of the Semarang City Government. **Purpose:** The purpose of this study is to analyze the financial performance of the Semarang City Regional Government for the 2018-2020 fiscal year, looking at the inhibiting and supporting factors of financial performance in improving regional financial performance. Then, efforts can be made to improve the local government of Semarang City. **Method:** The method used in this research are data reduction analysis methods, data presentation, data description through financial ratio analysis, namely decentralization ratio, dependency ratio, independence ratio, effectiveness ratio, efficiency ratio, growth ratio, harmony ratio, and drawing conclusions. **Result:** The results showed that the average decentralization ratio analysis was 44,7% in the good category, the regional financial dependence ratio was 52,42% in the very high category, the financial independence ratio was 86,36% in the high ability category, the effectiveness ratio was 96, 3%. in the quite effective category, the efficiency ratio is 100, 56% in the inefficient category, the growth ratio is divided into a PAD growth ratio of 4, 34% in fluctuating conditions and a 1% transfer growth ratio, the compatibility ratio is divided into an operating expenditure ratio of 77, 65% and a capital expenditure ratio of 68, 86%. The inhibiting factor is that the local government does not explore the existing potential, the level of public awareness in paying taxes and levies is still low. **Conclusion:** The financial performance of Semarang City still has obstacles in managing regional finances. Efforts made by the Regional Financial and Asset Management Agency in overcoming these obstacles by intensifying and extensifying, improving public services and making rewards and punishments. Coupled with the existence of supporting factors that help the government in improving regional financial performance.

Keywords: Financial Performance, Ratio Analysis, Regional Financial Capability

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penulis berfokus pada hasil kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Semarang. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Semarang tahun anggaran 2018-2020, melihat faktor penghambat dan pendukung kinerja keuangan dalam meningkatkan kinerja

keuangan daerah. Kemudian, upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pemerintah daerah Kota Semarang. **Metode:** Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis reduksi data, penyajian data, deskripsi data melalui analisis rasio keuangan yaitu rasio desentralisasi, rasio ketergantungan, rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio pertumbuhan, rasio keserasian, dan penarikan kesimpulan. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rata-rata analisis rasio desentralisasi dengan 44, 7% dalam kategori baik, rasio ketergantungan keuangan daerah 52, 42% dalam kategori sangat tinggi, rasio kemandirian keuangan 86, 36% dalam dikategori memiliki kemampuan tinggi, rasio efektivitas 96, 3% dalam kategori cukup efektif, rasio efisiensi 100, 56% dalam kategori tidak efisien, rasio pertumbuhan yang terbagi menjadi rasio pertumbuhan PAD sebesar 4, 34 % dalam kondisi fluktuatif dan rasio pertumbuhan transfer 1%, rasio keserasian terbagi menjadi rasio belanja operasi 77, 65% dan rasio belanja modal 68, 86%. Faktor penghambat yaitu pemerintah daerah kurang menggali potensi yang ada, tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi masih rendah. **Kesimpulan:** Kinerja keuangan Kota Semarang masih memiliki faktor hambatan dalam mengelola keuangan daerah. Upaya yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam mengatasi hambatan tersebut dengan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi, meningkatkan pelayanan publik serta membuat *reward* dan *punishment*. Ditambah dengan adanya faktor pendukung yang membantu pemerintah dalam meningkatkan kinerja keuangan daerah.

Kata kunci: Kinerja Keuangan, Analisis Rasio, Kemampuan Keuangan

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Suatu daerah dapat dikatakan maju dan berkembang jika mampu mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabilitas yang tinggi. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebagian daerah otonom di Indonesia belum mampu membiayai urusan pemerintahannya sendiri. Hal itu menandakan bahwa daerah masih belum mampu dalam mengelola keuangan daerahnya dalam melaksanakan urusan pemerintah di daerahnya. Dalam mengelola keuangan, pemerintah Kota Semarang masih dibiayai dana perimbangan dari pusat karena Pendapatan Asli Daerah belum menutupi belanja daerah. Asumsi penulis terhadap hal terjadi karena pengelolaan potensi daerah yang belum optimal. Dalam hal ini dapat berpengaruh pada tingkat ketergantungan pemerintah daerah Kota Semarang terhadap dana perimbangan dari pemerintah pusat. Dalam penyelenggaraan otonomi daerah Kota Semarang, permasalahan tersebut tidak dapat dibiarkan begitu saja. Jika dibiarkan maka pada waktu tertentu Kota Semarang akan dianggap gagal dalam menyelenggarakan otonomi daerah. Hal tersebut menandakan pemerintah Kota Semarang berkewajiban mengatasi permasalahan tersebut agar dapat meningkatkan kinerja keuangan daerah Kota Semarang.

Dalam menilai kinerja keuangan suatu pemerintah daerah antara lain dengan melakukan analisis rasio keuangan dalam APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakan. Mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan suatu cara untuk melihat kemampuan pemerintah daerah dalam

menjalankan otonomi daerah, selain itu menganalisis kinerja keuangan pemerintah juga dapat menjadi cerminan bagaimana pemerintah daerah tersebut dapat mengelola keuangan daerahnya dengan mengutamakan prinsip efisien namun tetap efektif dalam membangun daerahnya serta dijalankan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Terdapat beberapa permasalahan yang berkaitan dengan kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Semarang, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. 1
Pendapatan, Dana Perimbangan dan Belanja Daerah Kota Semarang
Tahun 2018-2020

Tahun	PAD	Pendapatan Transfer (Dana Perimbangan)	Belanja
2018	1.821.274.103.250	1.438.790.841.076	4.506.407.629.744
2019	2.066.333.418.588	1.738.443.043.620	4.633.934.340.973
2020	2.024.537.808.307	1.669.101.931.826	4.128.912.545.760

Sumber: Diolah penulis dari dpjk.kemenkeu, 2021

Berdasarkan tabel di atas dapat terlihat bahwa Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang masih belum stabil serta tingkat kontribusinya belum mencapai 50%. Data di atas juga menjelaskan mengenai belanja daerah Kota Semarang masih dibiayai melalui dana perimbangan dari pusat karena PAD Kota Semarang masih belum mampu menutupi belanja daerahnya. Struktur dari APBD dilihat dari penerimaan dan pengeluaran daerah tersebut. Penerimaan daerah adalah PAD, dana perimbangan, dan pendapatan lain-lain yang sah sedangkan pengeluaran daerah adalah belanja daerah.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya adalah pedoman yang dijadikan untuk penelitian selanjutnya dengan bahasan tema yang relevan untuk dijadikan bahan pertimbangan dan perbandingan sebagai perbaikan kedepannya. Adapun penelitian tersebut yaitu penelitian

Penelitian Karlina dan Handayani berjudul *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan APBD Kota Surabaya Tahun 2012-2015* menemukan bahwasannya pelaksanaannya dilakukan sebelum adanya pandemi *Covid-19* dan analisis yang digunakan yakni analisis varians Pendapatan Daerah, Analisis Varians Belanja Daerah, Analisis Keserasian Belanja Daerah.

Penelitian Anim R berjudul *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2011-2013* menemukan bahwasanya penelitian dilakukan sebelum adanya pandemi *Covid-19* dan menggunakan penelitian kuantitatif.

Penelitian selanjtnya berjudul *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan* menemukan bahwasannya penelitian menggunakan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni analisis kinerja keuangan di Kota Semarang, yang menggambarkan bagaimana kinerja keuangan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah, metodenya yang digunakan menggunakan kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Selain itu pengukuran/indikator yang digunakan juga berbeda dari penelitian sebelumnya yakni menggunakan pendapat dari Mahmudi dan Halim mengenai analisis rasio keuangan.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kinerja keuangan dalam pengelolaan keuangan daerah di Kota Semarang, faktor penghambat dan faktor pendukung yang mempengaruhi kinerja keuangan daerah di Kota Semarang, upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja keuangan daerah di Kota Semarang.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif induktif. Data yang digunakan dalam penelitian ini Laporan Realisasi Anggaran Kota Semarang sebagai data sekunder dan hasil wawancara sebagai data primer. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik dokumentasi dan wawancara secara mendalam terhadap 5 orang informan. Analisis data menggunakan metode analisis reduksi data, penyajian data, deskripsi data melalui analisis rasio keuangan yaitu rasio desentralisasi, rasio ketergantungan, rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio pertumbuhan, rasio keserasian, dan penarikan kesimpulan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah menggunakan pendapat dari Mahmudi mengenai analisis rasio keuangan. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

3.1 Analisis Rasio Keuangan Daerah

3.1.1 Rasio Derajat Desentralisasi

Kinerja pemerintah daerah guna meningkatkan pendapatan asli daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah dapat diukur menggunakan rasio derajat desentralisasi. Pemerintah daerah dikatakan berhasil apabila pendapatan asli daerah yang diterima semakin tinggi, maka semakin baik pula kinerja keuangan pemerintah daerah tersebut. Rasio tersebut diperoleh dengan membandingkan jumlah PAD dengan total pendapatan daerah.

Tabel 3. 1
Kriteria Penilaian Derajat Desentralisasi

Tahun	Derajat Desentralisasi Fiskal (%)	Kriteria
2018	43	Baik
2019	45, 26	Baik
2020	46	Baik
Rata-rata	44, 7	Baik

Sumber: Mahmudi, 2019 (Data diolah penulis, 2022)

Berdasarkan hasil perhitungan rasio derajat desentralisasi fiskal maka dapat disimpulkan bahwa kinerja pemerintah Kota Semarang dalam mengoptimalkan pendapatan asli daerah sudah baik namun pertumbuhannya masih belum stabil. Ketidakstabilan pertumbuhan derajat desentralisasi fiskal di Kota Semarang disebabkan pertumbuhan pendapatan asli daerah yang masih mengalami fluktuasi sementara total pendapatan daerah terus meningkat setiap tahunnya pada tahun anggaran bersangkutan. Dalam pengamatan di lapangan dan didukung oleh data sekunder yang telah dianalisis, ketidakstabilan pertumbuhan pendapatan asli daerah di Kota Semarang disebabkan oleh faktor kurang optimalnya pemanfaatan potensi yang dimiliki daerah sehingga menjadikan penerimaan pendapatan asli daerah juga menjadi tidak maksimal. Hal ini dibuktikan dari total pendapatan asli daerah yang belum mampu terealisasi 100%.

3.1.2 Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan digunakan sebagai tolak ukur untuk menentukan tingkat ketergantungan suatu daerah. Hasil perhitungan rasio ketergantungan akan menggambarkan seberapa besar tingkat ketergantungan suatu daerah dengan dana transfer. Sehingga tinggi hasil perhitungan rasio ini, maka semakin tinggi tingkat ketergantungan daerah kepada dana transfer begitupun sebaliknya.

Tabel 3. 2
Kriteria Penilaian Tingkat Ketergantungan Kota Semarang
Tahun 2018-2020

Tahun	Ketergantungan (%)	Kriteria
2018	54, 35	Sangat Tinggi
2019	52, 25	Sangat Tinggi
2020	50, 68	Sangat Tinggi
Rata-rata	52, 42	Sangat Tinggi

Sumber: Data diolah oleh penulis, 2022

Berdasarkan hasil penilaian dari rasio ketergantungan Kota Semarang, pada tahun anggaran 2018 hingga tahun 2019 masih termasuk pada kriteria sangat tinggi. Tahun 2020 masih termasuk dalam

kategori sangat tinggi, hampir mengalami sedikit penurunan menjadi kategori tinggi. Kriteria tersebut menunjukkan pendapatan transfer masih mendominasi total pendapatan daerah di Kota Semarang.

3.1.3 Rasio Kemandirian

Rasio kemandirian digunakan sebagai indikator untuk mengetahui kemampuan suatu daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahannya termasuk pelayanan publik, pembangunan, infrastruktur, kesehatan, maupun hal lain yang menjadi urusan pemerintahan daerah. Rasio kemandirian keuangan memberikan kondisi kinerja pemerintah daerah dalam memanfaatkan pendapatan asli daerah untuk membiayai penyelenggaraan urusan pemerintahan tanpa melibatkan pendapatan eksternal.

Tabel 3. 3
Pola Hubungan dan Tingkat Kemandirian Kota Semarang
Tahun 2018-2020

Tahun	Kemandirian (%)	Kemampuan Keuangan	Pola Hubungan
2018	79, 13	Tinggi	Delegatif
2019	89, 21	Tinggi	Delegatif
2020	90, 76	Tinggi	Delegatif
Rata-rata	86, 36	Tinggi	Delegatif

Sumber: Data diolah oleh penulis, 2022

Berdasarkan tabel 3. 3, dapat dilihat bahwa pada tahun 2018 Kota Semarang berada pada kategori kemampuan keuangan tinggi dengan pola hubungan yaitu delegatif. Pada tahun 2019 hingga tahun 2020, mengalami sedikit peningkatan, sehingga masih dalam kategori yang sama. Berdasarkan katagori tersebut, pemerintah daerah sudah dianggap mampu dalam membiayai urusan otonomi daerah.

3.1.4 Rasio Efektivitas

Rasio efektivitas digunakan sebagai tolak ukur untuk mengetahui gambaran kemampuan suatu daerah merealisasikan Pendapatan Asli Daerah berdasarkan target yang telah ditetapkan. Suatu daerah dapat dikategorikan sebagai daerah yang efektif dalam kemampuan keuangannya adalah daerah yang mampu mencapai rasio efektivitas 100%. Rasio efektivitas menunjukkan bagaimana kinerja pemerintah dalam mencapai target pendapatan asli daerah yang ditetapkan berdasarkan kondisi rill di daerah tersebut. Hal tersebut dapat diartikan semakin tinggi rasio efektivitas maka semakin baik kinerja keuangan daerah tersebut.

Tabel 3. 4
Kriteria Penilaian Tingkat Efektivitas Kota Semarang
Tahun 2018-2020

Tahun	Efektivitas (%)	Kriteria
2018	99,45	Efektif
2019	97,09	Cukup Efektif
2020	92,38	Cukup Efektif
Rata-rata	96,3	Cukup Efektif

Sumber: Mahmudi, 2019 (Data diolah penulis, 2022)

Berdasarkan tabel, dapat dilihat pada tahun 2018 rasio efektivitas sebesar 99,45%, tahun tersebut termasuk dalam kriteria efektif. Pada tahun 2019 dan 2020 termasuk dalam kategori cukup efektif. Rata-rata rasio efektivitas keuangan Kota Semarang termasuk dalam kriteria efektif. Pada tahun anggaran tersebut, pemerintah Kota Semarang sudah dapat dikatakan efektif dalam merealisasikan PAD. Sehingga total realisasi PAD mampu mencapai target yang telah ditetapkan.

3.1.5 Rasio Efisiensi

Rasio efisiensi dapat memberikan gambaran kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pembiayaan untuk belanja daerah berdasarkan total realisasi pendapatan daerah dalam APBD daerah tersebut. Rasio efisiensi sebagai tolak ukur dalam menentukan tingkat efisiensi penggunaan pendapatan daerah dalam membiayai keseluruhan belanja daerah. Dengan menentukan hasil rasio efisiensi keuangan suatu daerah maka akan memperkuat penilaian kinerja keuangan daerah tersebut.

Suatu kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat tercapai dengan sumber daya dan dana seminimal mungkin. Sehingga untuk melakukan pengukuran efisiensi dilakukan dengan cara membandingkan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan. Perhitungan rasio efisiensi yakni semakin kecil rasio efisiensi, maka kinerja pemerintah daerah semakin baik.

Tabel 3. 5
Penilaian Kriteria Rasio Efisiensi

Tahun	Efisiensi (%)	Kriteria
2018	106,4	Tidak Efisien
2019	101,5	Tidak Efisien
2020	93,8	Kurang Efisien
Rata-rata	100,56	Tidak Efisien

Sumber: Mahmudi, 2019 (data diolah oleh penulis, 2022)

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa pada tahun 2018 tingkat efisiensi keuangan daerah Kota Semarang termasuk dalam kriteria kurang efisien. Tahun 2018 hingga tahun 2019 tingkat efisiensi keuangan daerah Kota Semarang termasuk dalam kriteria tidak efisien. Artinya, kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Semarang dalam pengelolaan pendapatan daerah untuk membiayai keseluruhan belanja daerah masih belum efisien. Hal tersebut terjadi karena total belanja daerah dibawah total realisasi pendapatan daerah. Dalam hal ini yang dilakukan untuk meningkatkan efisiensi belanja daerah yaitu dengan perencanaan dan belanja yang baik.

3.1.6 Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan dan mempertahankan keberhasilan realisasi anggaran yang dicapai dari tahun ke tahun berikutnya. Dengan mengetahui pertumbuhan pada masing-masing sumber pendapatan dan pengeluaran, maka dapat digunakan untuk mengevaluasi potensi-potensi mana yang perlu mendapat perhatian. Hal tersebut membuat pemerintah lebih mengetahui potensi-potensi yang perlu mendapat perhatian agar dapat meningkatkan pendapatan dan pengeluaran mana yang perlu dipangkas. Pada penelitian ini, mengukur rasio:

1. Rasio Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah

Rasio pertumbuhan pendapatan asli daerah digunakan untuk memberikan gambaran kinerja keuangan pemerintah daerah selama beberapa periode anggaran, pertumbuhan yang positif akan menunjukkan peningkatan realisasi pendapatan asli daerah periode tahun anggaran tersebut.

Tabel 3.6
Hasil Perhitungan Rasio Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah
Kota Semarang Tahun 2018-2020

Tahun	Pertumbuhan (%)
2017-2018	1,64
2018-2019	13,4
2019-2020	-2,02
Rata-rata	4,34

Sumber: Data diolah penulis, 2022

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat pertumbuhan pendapatan asli daerah Kota Semarang selama tahun anggaran yang diteliti dalam kondisi fluktuatif. Pertumbuhan pendapatan asli daerah tertinggi terjadi pada tahun 2018-2019 dengan persentase pertumbuhan 11,76%. Sementara pertumbuhan pendapatan asli daerah dengan persentase terendah terjadi pada tahun anggaran 2019-2020, hingga mencapai -2,02%.

2. Rasio Pertumbuhan Pendapatan Transfer

Rasio pertumbuhan pendapatan transfer adalah rasio ini digunakan untuk memberikan gambaran pertumbuhan pendapatan transfer yang baik yang bersumber dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, maupun Pemerintah Daerah lainnya. Semakin tinggi presentase rasio pertumbuhan pendapatan transfer, maka meningkat tingkat ketergantungan daerah terhadap pendapatan transfer dalam membiayai pelanggaran otonomi daerah.

Tabel 3.7
Hasil Pehitungan Rasio Pertumbuhan Pendapatan Transfer
Kota Semarang Tahun 2018-2020

Tahun	Pertumbuhan (%)
2017-2018	5, 9
2018-2019	3, 6
2019-2020	-6, 5
Rata-rata	1

Sumber: Data diolah penulis, 2022

Tabel di atas menunjukkan pertumbuhan pendapatan transfer daerah Kota Semarang selama tahun anggaran yang diteliti mengalami fluktuatif. Pertumbuhan pendapatan transfer tertinggi terjadi pada tahun 2018-2019 dengan persentase pertumbuhan 5, 9%. Sementara pertumbuhan pendapatan asli daerah dengan persentase terendah terjadi pada tahun anggaran 2019-2020, hingga mencapai -6, 5%.

3.1.7 Rasio Keserasian

1. Rasio Belanja Operasi

Perbandingan antara total belanja operasi dengan total belanja daerah, serta menginformasikan mengenai porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk belanja operasi. Pada umumnya proporsi belanja operasi antara 60-90%, sehingga mendominasi total belanja daerah secara keseluruhan.

Tabel 3. 8
Hasil Pehitungan Rasio Keserasian Belanja Daerah dan Belanja Operasi
Kota Semarang Tahun 2018-2020

Tahun	Belanja Operasi	Belanja Daerah	Keserasian (%)
2018	3.276.818.579.788	4.506.407.629.744	72, 71
2019	3.576.946.715.447	4.633.934.340.973	77, 19
2020	3.429.805.611.104	4.128.912.545.760	83, 07
Rata-rata			77, 65

Sumber: Data diolah penulis, 2022

Tabel 3.8 menunjukkan keserasian belanja daerah dengan belanja operasi daerah Kota Semarang selama tahun anggaran yang diteliti mengalami peningkatan. Keserasian belanja daerah dan belanja operasi daerah tertinggi terjadi pada tahun 2020 dengan persentase keserasian 83,07%. Sementara keserasian belanja daerah dan belanja operasi dengan persentase terendah terjadi pada tahun anggaran 2018 dengan persentase keserasian 72,71%.

2. Rasio Belanja Modal

Melalui rasio belanja modal dapat diketahui seberapa besaran belanja daerah yang dialokasikan untuk investasi dalam bentuk belanja modal pada tahun anggaran bersangkutan, sehingga dapat diketahui seberapa besar pengeluaran yang dilakukan pemerintah daerah Kota Semarang untuk membiayai modal perusahaan dalam menjalankan kegiatan pengelolaan di Kota Semarang.

Tabel 3.9
Hasil Perhitungan Rasio Keserasian Belanja Daerah dan Belanja Modal
Kota Semarang Tahun 2018-2020

Tahun	Belanja Modal	Belanja Daerah	Keserasian (%)
2018	1.228.459.434.270	4.506.407.629.744	30,28
2019	1.127.005.683.601	4.633.934.340.973	24,32
2020	506.420.330.795	4.128.912.545.760	12,26
Rata-rata			68,86

Sumber: Data diolah penulis, 2022

Besarnya rasio belanja modal dan belanja operasi terhadap total APBD yang dapat dikatakan ideal belum memiliki tolak ukur yang pasti. Perubahan dalam setiap kegiatan pembangunan dan terus bertambahnya kebutuhan investasi sangat berpengaruh dalam percepatan pertumbuhan yang telah ditargetkan.

3.2 Faktor Penghambat Dan Faktor Pendukung Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2017-2020.

Beberapa faktor penghambat dalam peningkatan kinerja keuangan daerah yaitu sebagai berikut:

- Pemerintah daerah kurang menggali potensi daerah yang ada, serta terdapat kelalaian dalam tahap perencanaan pengelolaan keuangan;
- Rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi.

Faktor pendukung dalam peningkatan kinerja keuangan daerah yaitu sebagai berikut:

- Letak strategis Kota Semarang;
- Adanya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur baik melalui pembinaan, pelatihan internal maupun melalui peningkatan jenjang pendidikan.

3.3 Upaya Meningkatkan Kinerja Keuangan Daerah Kota Semarang:

- Meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan APBD serta didukung dengan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan sesuai dengan kewenangan

yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Semarang dengan memperhatikan potensi-potensi pendapatan yang ada dengan tetap mendasarkan kepada aspek pelayanan, keadilan dan kepentingan umum;

- b. Meningkatkan pelayanan publik sehingga dapat mendorong kesadaran masyarakat dalam membayar pajak sehingga penerimaan daerah terus meningkat, agar dapat digunakan untuk melakukan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat meningkat. Selain itu, pemerintah daerah menerapkan adanya *reward* dan *punishment*. *Reward* akan didapatkan bagi wajib pajak yang taat dalam membayar pajak, begitupun sebaliknya.

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Semarang belum optimal, masih terdapat beberapa faktor penghambat yaitu pemerintah daerah kurang menggali potensi daerah yang ada, terdapat kelalaian dalam tahap perencanaan pengelolaan keuangan, rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa bahwa kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Semarang belum optimal, masih terdapat beberapa faktor penghambat yaitu pemerintah daerah kurang menggali potensi daerah yang ada, terdapat kelalaian dalam tahap perencanaan pengelolaan keuangan, rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi. Terdapat juga faktor pendukung yaitu letak strategis Kota Semarang dan adanya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni hanya sebatas mengetahui keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Aset Pemerintah Daerah Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah menggunakan analisis rasio keuangan daerah berdasarkan teori Mahmudi.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan analisis kinerja keuangan daerah di Kota Semarang untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Andirfa, Mulya. (2018). *Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah*. Aceh: Unimal Press.
- Fahmi, Irham. (2018). *Pengantar Ilmu Kepemimpinan*. Depok: Rajawali Pers.
- Halim & Syam. (2017). *Teori, Konsep, Dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Labolo, Muhadam. (2014). *Memahami Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Mahmudi. (2019). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Nuridin, Ismail. (2017). *Etika Pemerintahan*. Yogyakarta: Lintan Rasi Aksara Books.

Patarai, Idris. (2017). *Kinerja Keuangan Daerah*. Makassar. De La Macca.

Sinurat, Marja & Panjaitan. (2017). *Perencanaan Dan Penganggaran Daerah*. Bandung: Pustaka Rahmat.

Sinurat, Marja. (2018). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Sinurat, Marja, dkk. (2017). *Cara Cerdas Dan Mahir 456 Tanya Jawab Pengelolaan Keuangan Daerah*. Bandung: Pustaka Rahmat.

Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Wasistiono, Sadu & Fernandes Simangunsong. (2015). *Metodologi Ilmu Pemerintahan*. Jatinangor: IPDN Press.

